

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT.Angkasa Pura 1 (Persero)

PT.Angkasa Pura 1 (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan *Department* Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dibantu beberapa Direktur yang menjalankan tugas pokoknya mengusahakan dan menyelenggarakan penyediaan jasa kebandar udaraan dan bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

Pada awalnya perusahaan ini adalah perusahaan negara yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1962 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa “Kemayoran” dengan tugas pokok mengurus dan mengusahakan Bandar Udara Kemayoran. Pada tahun 1965, melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1965 PN Angkasa “Kemayoran” berubah nama menjadi “PN. Angkasa Pura”. Selain itu, juga dapat mengurus dan mengusahakan Bandar Udara di daerah – daerah sebagai cabang.

Kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1974, ditetapkan perubahan bentuk badan hukum dari “Perusahaan Negara (PN)” menjadi “Perusahaan Umum (PERUM)” Angkasa Pura. Pada tahun 1974 Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ditetapkan menjadi Bandar Udara kedua yang dikelola manajemen Angkasa Pura.

Dengan selesainya pembangunan Bandar Udara Soekarno – Hatta Cengkareng pada tahun 1985, merupakan titik awal dibentuknya Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II serta disusul dengan ditutupnya kegiatan operasional di Bandar Udara Kemayoran, sementara Perum Angkasa Pura I bertugas untuk mengelola beberapa Bandar Udara di daerah dengan kantor Pusat tetap di Jakarta.

Pada tahun 1985 tersebut, telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 yang mengatur kembali tentang Perum Angkasa Pura, yang dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1974 terhadap perkembangan terakhir pada waktu itu. Adapun realisasi pemisahan manajemen ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 terjadi perubahan nama perusahaan dari Perum Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang menginginkan agar BUMN uang telah dinilai baik dan mampu untuk lebih menekankan dan berorientasi pada keuntungan, maka dengan peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1992 Perum Angkasa Pura I berubah bentuk menjadi PT. Angkasa Pura I (PERSERO).

Dengan diberlakukannya pembagian wilayah kerja perusahaan berdasarkan wilayah timur dan barat, berdampak terhadap pengelolaan bandar udara Polonia Medan terhitung tanggal 1 Januari 1993 PT. Angkasa Pura II (PERSERO) yang disahkan pada tanggal 24 Maret 1994.

Sampai saat ini PT. Angkasa Pura I (PERSERO) diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola 13 Bandar Udara di kawasan timur Indonesia. bandar udara tersebut adalah, Bandar Udara Ngurah Rai – Denpasar, Juanda - Surabaya, Hasanuddin – Makassar, Sepingan – Balikpapan, Fran Kaiseipo – Biak, Sam Ratulangi – Manado, Achmad Yani – Semarang, Selaparang – Mataram dan El Tari – Kupang.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan besar, PT. Angkasa Pura I (PERSERO) memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :

2.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi Bandar Udara Niaga yang mampu memberikan pelayanan jasa kebandar udaraan, sesuai dengan standar Internasional yang ditetapkan serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

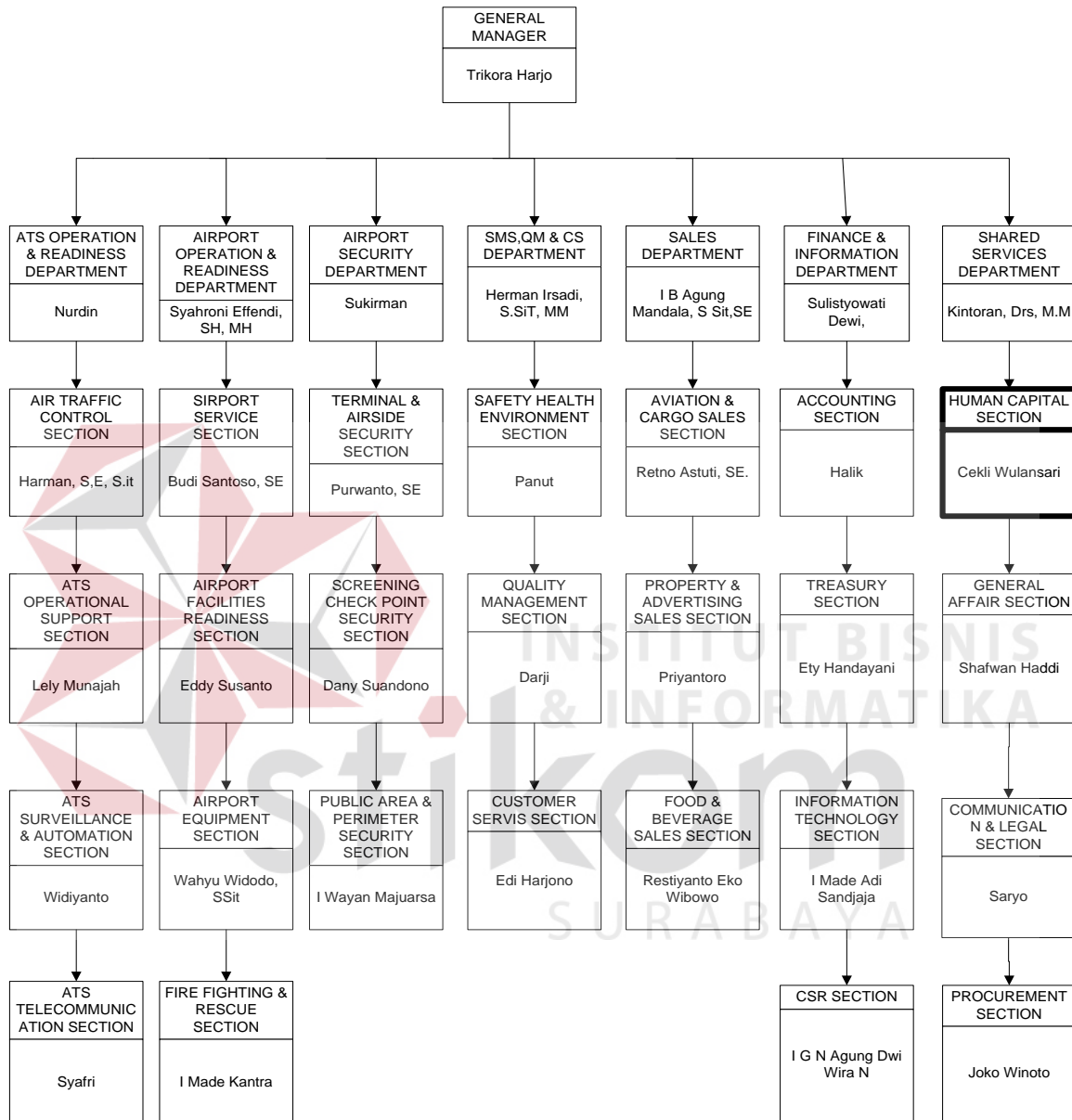
2.2.2 Misi Perusahaan

- a) Menyediakan layanan jasa kebandar udaraan sesuai dengan standar pelayanan prima yang ditetapkan.
- b) Menjadikan Bandar Udara sebagai salah satu pilar pembangunan wilayah khususnya perekonomian Provinsi Jawa Timur.
- c) Mengembangkan potensi Bandar Udara yang berorientasi pada *profit* dalam rangka menunjang APBN.

- d) Melaksanakan bina lingkungan (*Community Development*) melalui
- a. Penyaluran kredit lunak.
 - b. Penyaluran hibah dana untuk bantuan pembangunan daerah sekitar Bandara.



2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura I (PERSERO)